



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2019 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Singkawang terutama mengenai pedoman kode klasifikasi arsip sudah tidak sesuai dengan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kode Klasifikasi arsip adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya.
7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Arsip merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam rangka pengelolaan arsip dinamis.
- (2) Klasifikasi Arsip menggunakan kode klasifikasi arsip dalam bentuk angka.
- (3) Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Klasifikasi Arsip, meliputi:

- a. 000 Umum;
- b. 100 Pemerintahan;
- c. 200 Politik;
- d. 300 Keamanan/Ketertiban;
- e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
- f. 500 Perekonomian;
- g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
- h. 700 Pengawasan;
- i. 800 Kepegawaian; dan
- j. 900 Keuangan.

BAB IV KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V KLASIFIKASI ARSIP PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkanya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pasal 8 Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2019 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 16 Desember 2022

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RILEY AMRI, S.H
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN KODE KLASIFIKASI
ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG

A. BENTUK DAN SUSUNAN POLA KODE KLASIFIKASI ARSIP

1. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang dimuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan dan penemuan kembali arsip;
2. Klasifikasi Masalah adalah penggolongan arsip yang didasarkan atas isi masalah yang terdapat di dalam arsip. Arsip yang isi keterangan (informasi) yang sama dikelompokkan menjadi satu misalnya : Arsip – arsip yang berkaitan dengan masalah kepegawaian dikelompokkan sendiri, demikian juga mengenai keuangan dan sebagainya;
3. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus. Dalam hubungan masalah didahului oleh perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola;
4. Kode adalah tanda pengenal masalah seperti yang tercantum dalam pola klasifikasi;
5. Kode Klasifikasi adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas ditempat penyimpanannya;
6. Kode komponen adalah tanda pengenal komponen unit pengolah yang mengolah/menangani naskah dinas dan ditulis dengan huruf ditempatkan dibelakang nomor urut;
7. Kegiatan fasilitatif adalah kegiatan penunjang untuk membantu memperlancar tugas pokok dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan suatu instansi;
- 8.

Kegiatan Substantif adalah kegiatan yang menyangkut fungsi dan tugas pokok organisasi yang bersangkutan dan bersifat operasional, kegiatan substantif ini membedakan antara organisasi satu dengan yang lainnya;

8. Angka 100 sampai dengan 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 100, 700, 800 dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif. Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif di luar pengawasan, kepegawaian, dan keuangan. Disamping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggaan, seperti protokol urusan dalam dan masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang Negara atau Daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
9. Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas seluruh OPD.

Sepuluh pokok masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

000 Umum

100 Pemerintahan

200 Politik

300 Keamanan dan Ketertiban

400 Kesejahteraan

500 Perekonomian

600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan

700 Pengawasan

800 Kepegawaian

900 Keuangan

10. Kode pembantu merupakan penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambahkan dibelakang tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip. Kode pembantu dimaksud tersebut adalah:

01 Perencanaan

02 Penelitian

03 Pendidikan

04 Laporan

- 05 Panitia
- 06 Seminar, Lokakarya, Workshop
- 07 Statistik
- 08 Peraturan perundang-undangan
- 09

B. CARA PENGGUNAAN

1. Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antar masalah dan anak masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dengan prinsip berjenjang. Tiap kode, kecuali kode masalah yang pokok pada perincian pertama merupakan bagian dan sub ordinat dari kode atasannya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar masalah 873.1 (NIP) harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian dari 873 (Registrasi) dan 873 (Registrasi) merupakan bagian dari 870 (TU Kepegawaian) dan 870 (TU Kepegawaian) bagian dari 800 (Kepegawaian).
2. Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang paling tepat harus dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut pandangan mana masalah dalam surat tidak selalu mudah, pada umumnya “perihal” surat yang dicantumkan dibagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali “perihal” tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat, bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada ketepatan pemberian kode.
3. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati- hati memilih yang akan ditentukan menjadi masalah pokok. Masalah yang dipilih haruslah yang paling berat tekanannya, dan harus diyakini benar, bahwa itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali arsip.

4. Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci. Masalah Peraturan Walikota dapat secara berturut-turut diberi kode:

- a. 188.342 Peraturan Daerah Kabupaten
- b. 188.34 Peraturan Daerah
- c. 188.3 Peraturan
- d. 188 Peraturan Perundang-undangan

Untuk instansi yang besar dapat mempergunakan pemberian kode dimaksud huruf a. Sedangkan makin kecil sesuatu instansi dapat mempergunakan kode dimaksud huruf b atau huruf c, yang lebih sederhana dan untuk instansi kecil misalnya kecamatan dapat mempergunakan kode dimaksud huruf d.

5. Kode Pembantu

Kode Pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan kode yang memerlukan perincian lebih lanjut. Dengan ditambahkan kode pembantu, maka dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip. Contoh:

591 Tata Guna Tanah

.02 Perpetaan

147 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa

.13 Latihan Kerja Masyarakat

.135 Kurikulum/Silabus

6. Apabila pada kode ada petunjuk “tambahan perincian” berarti harus menambahkan kode

Contoh I : Proyek Pasar

511.2 - Pasar (Bidang Perekonomian)

551.12 - Proyek Pasar

7. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan dua macam kode, dan 2 kode yang berlainan itu benar. Peraturan pemerintah tentang pensiun, bisa diklasifikasikan dengan kode 188.31 Peraturan Pemerintah atau 882.08 Peraturan tentang Pensiun. Masalah pemberhentian dengan pensiun (882), ditambah dengan kode pembantu untuk Peraturan Perundang-undangan (08). Kedua cara pengklasifikasian isi sama-sama benar. Cara ini dimaksud untuk memberikan keleluasan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis Peraturan Pemerintah,

maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas dilakukan berdasarkan masalah (pensiun), maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah kode pembantu.

8. Tunjuk Silang Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut dan mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat Kartu Tunjuk Silang. Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode : Satu kode diisikan pada Kartu Kendali, dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang. Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dari dua arah. Contoh : Surat tentang “ Persawahan untuk transmigrasi” dapat diberi kode 521.5 (Persawahan) dengan menunjuk kode 475 (Transmigrasi) atau sebaliknya. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan Tunjuk Silang terbatas pada masalah-masalah yang memang sangat penting.

C. KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH DAERAH

000	UMUM
000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
000.1.1	Telekomunikasi
000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri
000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD
000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri
000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD
000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya)
000.1.5	Rapat pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)
000.1.6	Penyediaan Konsumsi
000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas
000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan
000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
000.1.8.1	Pertamanan/ Landscape
000.1.8.2	Penghijauan
000.1.8.3	Perbaikan Gedung
000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor
000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman
000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
000.1.9.1	Perbaikan / Pemeliharaan
000.1.9.2	Pemasangan
000.1.10	Ketertiban dan Keamanan
000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan
000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir
000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya
000.2	PERLENGKAPAN
000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan
000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan

	000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
000.2.2		Pemeliharaan peralatan kantor
	000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor
	000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
000.2.3		Distribusi
	000.2.3.1	Barang habis pakai
	000.2.3.2	Barang milik daerah
000.2.4		Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan)
000.2.5		Pengelolaan Database Barang Milik Daerah

000.3 PENGADAAN

000.3.1		Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)
000.3.2		Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
000.3.3		Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
000.3.4		Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)
000.3.5		Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa)
000.3.6		Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi)

000.4 PERPUSTAKAAN

000.4.1		Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
000.4.2		Deposit Bahan Pustaka
	000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
	000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
	000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional
	000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

	000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog
000.4.3	Koleksi Pustaka	
	000.4.3.1	Pembelian
	000.4.3.2	Hibah
	000.4.3.3	Hadiah
	000.4.3.4	Tukar Menukar
	000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR
	000.4.3.6	Terbitan Internal
	000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus
	000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka	
000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi	
000.4.6	Layanan Perpustakaan	
	000.4.6.1	Keanggotaan
	000.4.6.2	Peminjaman
	000.4.6.3	Pengembangan gemar baca
000.4.7	Kerjasama Perpustakaan	
	000.4.7.1	MoU
	000.4.7.2	Perjanjian kerjasama
	000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
000.4.8	Pengembangan Perpustakaan	Implementasi Teknologi Informasi
	000.4.8.1	Pengembangan situs web
	000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
	000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan
	000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepubstakaan digital
000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	
000.4.10	Konservasi	
	000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan
000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	
000.4.12	Transformasi Digital	
000.4.13	Kurasi Digital	
000.4.14	Pengembangan Perpustakaan	
	000.4.14.1	Perpustakaan Umum
	000.4.14.2	Perpustakaan Khusus
	000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah
	000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi

000.5	KEARSIPAN
000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
000.5.2	Pembinaan Kearsipan
000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)
000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
000.5.2.3	Penilaian Arsiparis
000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)
000.5.2.5	Data Base Arsiparis
000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi)
000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan)
000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)
000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)
000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis
000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)
000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)
000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip)

	000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis)
000.5.4		Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)
000.5.5		Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)
000.5.6		Penyusutan Arsip
	000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)
	000.5.6.2	Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan)
	000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
000.5.7		Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)
000.5.8		Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
	000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
	000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
000.5.9		Pengelolaan Arsip Statis

	000.5.9.1	Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip , Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan)
	000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan
	000.5.9.3	Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip)
	000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
	000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide
	000.5.9.6	Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
	000.5.9.7	Preservasi Kuratif
	000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis)
	000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
000.5.10		Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)
000.5.11		Pengelolaan SIKN dan JIKN
000.5.12		Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
000.5.13		Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
000.5.14		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
000.5.15		Pengawasan Kearsipan
	000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal
	000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal
	000.5.15.3	Sanksi
000.6	PERSANDIAN	
000.6.1		Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
000.6.2		Pengamanan persandian
	000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto

	000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi
	000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan
000.6.3		Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
	000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian
	000.6.3.2	Administrasi Pengkajian
	000.6.3.3	Pelaksanaan
	000.6.3.4	Pelaporan
000.6.4		Pembinaan dan Pengendalian Persandian
	000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)
	000.6.4.2	Jaring Komunikasi
000.6.5		Layanan Sertifikasi Elektronik
	000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi
	000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi
	000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
	000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing
	000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
	000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
	000.6.5.7	Pelaporan

000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

000.7.1		Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
	000.7.1.1	Musrenbang Provinsi
	000.7.1.2	Musrenbang Nasional
	000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota
	000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan
	000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan
	000.7.1.6	Musrenbang Desa
000.7.2		Perencanaan Pembangunan Daerah
	000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
	000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
	000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah
	000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
	000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
	000.7.2.6	Program kerja tahunan
	000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja
	000.7.2.8	Laporan Berkala
	000.7.2.9	Laporan Insidental
	000.7.2.10	Evaluasi Program
000.7.3		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan
000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
000.7.6	Aksi Strategis Daerah
000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan
000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
000.7.7.2	Pendanaan Daerah
000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional
000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara
000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru

000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
000.8.1.1	Pembentukan
000.8.1.2	Pengubahan
000.8.1.3	Pembubaran
000.8.2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja
000.8.2.1	Analisa Jabatan
000.8.2.2	Analisa Beban Kerja
000.8.3	Ketatalaksanaan
000.8.3.1	Proses Bisnis
000.8.3.2	Standar Pelayanan
000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur
000.8.3.4	Pelayanan Publik
000.8.4	Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
000.8.5	Evaluasi Kelembagaan
000.8.6	Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
000.8.6.1	Budaya Kerja
000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
---------	---

000.9.2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi)
000.9.3	Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan
000.9.4	Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
000.9.5	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.6	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.6.1	Data
000.9.6.2	Statistik
000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
000.9.7	Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.8	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
000.9.9	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
000.9.10	Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop

100 PEMERINTAHAN

100.1 OTONOMI DAERAH

100.1.1	Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
100.1.2	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
100.1.3	Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
100.1.4	Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
100.1.4.1	Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
100.1.4.2	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
100.1.4.3	Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
100.1.4.4	Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
100.1.4.5	Assosiasi Daerah
100.1.5	Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
100.1.5.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
100.1.5.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

	100.1.5.3	Pengembangan Kapasitas Daerah
100.1.6	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	
100.2	PEMERINTAHAN UMUM	
100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama	
	100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
	100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
	100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
	100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan
	100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum
100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan	
	100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah
	100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
	100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
	100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
	100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah
100.3	HUKUM	
100.3.1	Program Legislasi	
	100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
	100.3.1.2	Program Legislasi
100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan)	
100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah	
	100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur
	100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati
	100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota
	100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
	100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten

100.3.4	100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
	Instruksi/Surat Edaran	
	100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi
	100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
	100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota
100.3.5	100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
	Surat Perintah	
	100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
	100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
	100.3.5.3	Surat Perintah Walikota
100.3.6	100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	
100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama	
	100.3.7.1	Dalam Negeri
	100.3.7.2	Luar Negeri
100.3.8	Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	
100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	
100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	
	Kasus/ Sengketa Hukum	
100.3.11	100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
	100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
	100.3.11.3	Tata Usaha Negara
	100.3.11.4	Perburuhan
	100.3.11.5	Arbitrase
	100.3.11.6	Sengketa Adat
100.3.12	Perijinan	
100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
	100.3.13.1	Hak Cipta
	100.3.13.2	Hak Paten
	100.3.13.3	Hak Desain Industri
	100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
	100.3.13.5	Hak Merk
100.3.14	Permohonan HaKI yang ditolak	

200 POLITIK

200.1

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
---------	---

200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara
200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan
200.1.2.3	Bela Negara
200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
200.1.3	Kewaspadaan Nasional
200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
200.1.4.1	Ketahanan Seni
200.1.4.2	Ketahanan Budaya
200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
200.1.4.6	Fasilitasi
200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
200.1.5	Politik Dalam Negeri
200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
200.1.5.6	Pemerintah Daerah
200.1.5.7	Database Parpol
200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
200.1.5.9	Pemilihan Umum

	200.1.6	Ketahanan Ekonomi
	200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
	200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
	200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
	200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
200.2	PEMILU	
	200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
	200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
	200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
	200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
	200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
	200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
	200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
	200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
	200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
	200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual
	200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu
	200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
	200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
	200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan
	200.2.5	Pencalonan Pemilu
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
	200.2.5.3	Daftar bakal calon
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi

	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
200.2.6	Kampanye Pemilu	
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
	200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
	200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
200.2.7	Dana Kampanye	
	200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
	200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
	200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye
200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara	
	200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
	200.2.8.2	Master surat suara
	200.2.8.3	Surat suara yang terpakai
	200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
	200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu	
200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu	
	200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
	200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon
	200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan
200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu	

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
	300.1.2.1 Tata Operasiona Polisi Pamong Praja
	300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
300.1.4	Perlindungan Masyarakat
300.1.5	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
300.1.6	Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN

300.2.1	Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
300.2.2	Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan

	300.2.2.1	Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
	300.2.2.2	Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
	300.2.2.3	Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
	300.2.2.4	Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
	300.2.2.5	Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
	300.2.2.6	Registrasi BEACON
300.2.3		Pencegahan dan Kesiapsiagaan
300.2.4		Potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5		Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
	300.2.5.1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan
	300.2.5.2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5.3	Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
	300.2.5.4	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
	300.2.5.5	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.6		Operasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.7		Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
300.2.8		Operasi Komunikasi
	300.2.8.1	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
	300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
	300.2.8.3	Registrasi BEACON
300.2.9		Inventarisasi dan Pemeliharaan
300.2.10		Pengembangan Sistem Informasi
300.2.11		Penyajian dan Layanan Informasi
300.2.12		Pelapooran dan Evaluasi
	300.2.12.1	Laporan Harian
	300.2.12.2	Laporan Bulanan
	300.2.12.3	Laporoan Tahunan
	300.2.12.4	Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
---------	---

400.1.2	Pembangunan Sumber Daya
400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi
400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.3	Peningkatan Infrastruktur
400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa

		tertinggal
	400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
	400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	
	400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
	400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
	400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
	400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.5	Ketenagakerjaan
	400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus	
	400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
	400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
	400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
	400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
	400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
	400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
	400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi

400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum	
	400.2.2.1	Data gender
	400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi
400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)	
	400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
	400.2.3.2	Data perlindungan perempuan
	400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
	400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi

	gender
400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender
400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
400.2.4	Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
400.2.4.2	Data perlindungan anak
400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi
400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak
400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak
400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak
400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi
400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
400.2.7	Penghargaan Kabupaten Layak Anak
400.2.8	Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

400.3 PENDIDIKAN

400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
400.3.2.2	Pelatihan Sosial
400.3.2.3	Peringatan Hari anak
400.3.2.4	Block Grant
400.3.3	Pendidikan Masyarakat
400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
400.3.3.3	Pembinaan Program
400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
400.3.3.5	Pameran
400.3.3.6	Rakor
400.3.3.7	Sosialisasi

	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama	
	400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
	400.3.5.2	Block Grant
	400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
	400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
	400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
	400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus	
	400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
	400.3.6.2	Block Grant
	400.3.6.3	Lomba, festival
	400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.6.5	Pendataan
	400.3.6.6	Kelembagaan
400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan
	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru
	400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
	400.3.7.7	Block Grant
400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
	400.3.8.1	Kurikulum
	400.3.8.2	Bahan Ajar
	400.3.8.3	Pelatihan
	400.3.8.4	Block grant
	400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
	400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival
	400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
	400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
	400.3.9.1	Bahan ajar
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis
	400.3.9.3	Block grant
	400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
	400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
	400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
	400.3.9.8	Pendataan
	400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah,

		Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
	400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.10.3	Setifikasi Guru
	400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
	400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
	400.3.10.7	Block grant
	400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
400.3.11	Penilaian Pendidikan	
	400.3.11.1	Penilaian Akademik
	400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
	400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan	
	400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
	400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan	
	400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
	400.3.13.2	Sarana Pendidikan
	400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi

400.4 KEOLAHRAGAAN

400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan
400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
400.4.3	Pengelolaan Olahraga Rekreasi
400.4.3.1	Olahraga Massal
400.4.3.2	Olahraga Tradisional
400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
400.4.4	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
400.4.4.1	Olahraga Pendidikan
400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
400.4.4.3	Olahraga Prestasi

	400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
400.4.5		Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
	400.4.5.1	Olahraga Tradisional
	400.4.5.2	Layanan Khusus
400.4.6		Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
	400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
	400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
400.4.7		Pembibitan dan IPTEK Olahraga
	400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
	400.4.7.2	Kompetisi
	400.4.7.3	IPTEK Olahraga
400.4.8		Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
	400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
	400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
400.4.9		Industri dan Promosi Olahraga
	400.4.9.1	Industri Olahraga
	400.4.9.2	Promosi Olahraga
400.4.10		Olahraga Prestasi
	400.4.10.1	Daerah
	400.4.10.2	Nasional
	400.4.10.3	Internasional
400.4.11		Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
	400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
	400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
	400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga

400.5 KEPEMUDAAN

400.5.1	Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
400.5.2	Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda		
	400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)	
	400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)	
	400.5.2.3	Pengembangan	
400.5.3	Peningkatan Wawasan Pemuda		
	400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan	
	400.5.3.2	Wawasan Lingkungan	
	400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum	
400.5.4	Peningkatan Kapasitas Pemuda		
	400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa	
	400.5.4.2	Kapasitas IPTEK	
	400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK	
400.5.5	Peningkatan Kreativitas Pemuda	(Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)	
	400.5.5.1	Pengkajian	

	400.5.5.2	Pengembangan
	400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)
400.5.6	Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	
	400.5.6.1	Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
	400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
400.5.7	Kewirausahaan	
	400.5.7.1	Kelembagaan
	400.5.7.2	Pengaderan
	400.5.7.3	Perintisan
400.5.8	Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	
	400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	
	400.5.9.1	Standardisasi
	400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda
400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	
	400.5.10.1	Kemitraan
	400.5.10.2	Penghargaan Pemuda

400.6 KEBUDAYAAN

400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	
	400.6.2.1	Registrasi Nasional
	400.6.2.2	Pelindungan
	400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan
	400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi
400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	
	400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan
	400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa
	400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
	400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi
400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya	
	400.6.4.1	Sejarah
	400.6.4.2	Pemetaan nilai

	400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
	400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi
	400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
	400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah
400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	
	400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya
	400.6.5.2	Kekayaan budaya
	400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia
	400.6.5.4	Diplomasi budaya

400.7 KESEHATAN

400.7.1	Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.7.2	Upaya Kesehatan Dasar	
	400.7.2.1	Pelayanan kedokteran keluarga
	400.7.2.2	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
	400.7.2.3	Pelaksanaan kesehatan primer
	400.7.2.4	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
	400.7.2.5	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
	400.7.2.6	ICD 10, Destistry & Stomatology
	400.7.2.7	Infeksi menular lewat transfusi darah
	400.7.2.8	Penyakit mulut di tingkat primer
	400.7.2.9	Pembiayaan darah
	400.7.2.10	Penggunaan darah rasional
	400.7.2.11	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
	400.7.2.12	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
	400.7.2.13	Akreditasi puskesmas
	400.7.2.14	Puskesmas berprestasi
400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan	
	400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan
	400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
	400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat
	400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
	400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
	400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
	400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing

		dan perdagangan jasa
	400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
	400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
	400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik	
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan	
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
	400.7.5.3	Radiologi
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
400.7.6	Kesehatan Jiwa	
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
	400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
	400.7.7.2	Imunisasi
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
	400.7.7.4	Kesehatan matra
400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung	
	400.7.8.1	Pengendalian tuberkulosis
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual

	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang	
	400.7.9.1	Pengendalian malaria
	400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
	400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
	400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular	
	400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
	400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
	400.7.10.3	Penyakit kanker
	400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
	400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7.11	Penyehatan lingkungan	
	400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
	400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
	400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
	400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	
400.7.13	Gizi	
	400.7.13.1	Gizi makro
	400.7.13.2	Gizi mikro
	400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik
	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
400.7.14	Kesehatan ibu	
	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
	400.7.14.4	Keluarga berencana
	400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
400.7.15	Kesehatan anak	
	400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
	400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
	400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita

		beresiko
	400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
	400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	
	400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
	400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
	400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga	
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
	400.7.17.2	Kapasitas kerja
	400.7.17.3	Lingkungan kerja
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
	400.7.17.6	Kesehatan olahraga
400.7.18	Obat Publk dan perbekalan kesehatan	
	400.7.18.1	Harga obat publik
	400.7.18.2	Pengadaan obat
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan	
	400.7.19.1	Alat kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400.7.20	Kefarmasian	
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
	400.7.20.2	Farmasi klinis
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian	
	400.7.21.1	Obat tradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	
	400.7.22.1	Surat keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan

		dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
400.7.25	Intelegensia Kesehatan	
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
	400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
400.7.26	Kesehatan Haji	
	400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
	400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
400.7.27	Promosi Kesehatan	
	400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
	400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
	400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
	400.7.27.4	Hari kesehatan
400.7.28	Data dan Informasi	
	400.7.28.1	Statistik kesehatan
	400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi
	400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	
	400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
	400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
	400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
	400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	
	400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan
	400.7.30.2	Standardisasi produk pangan
	400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
	400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan
	400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan

		berbahaya
	400.7.31	Rekam Medis
400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	
	400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.8.2	Fasilitasi
	400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
	400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
	400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
	400.8.2.4	Kasus Keagamaan
	400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
	400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
	400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan
	400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
	400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan
	400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
	400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
400.9	SOSIAL	
	400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak
	400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita
	400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar
	400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
	400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
	400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
	400.9.3	Rehabilitasi Sosial
	400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
	400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi social
	400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social
	400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
	400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung

	400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan
	400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
	400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
400.9.5		Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
400.9.6		Pelayanan sosial lanjut usia
	400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
	400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
	400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
400.9.7		Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial
400.9.8		Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
400.9.9		Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
	400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
	400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
	400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
400.9.10		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
	400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
	400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
	400.9.10.4	Kerjasama
400.9.11		Jaminan Sosial
	400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi
	400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
	400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
	400.9.11.4	Kerjasama
400.9.12		Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
	400.9.12.1	Ketahanan keluarga
	400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
	400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial

	400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
	400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil	
	400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
	400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
	400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi
	400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
	400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan	
	400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
	400.9.14.2	Pengembangan kapasitas
	400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh
	400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
	400.9.14.5	Bantuan Langsung
	400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
400.9.15	Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
	400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
	400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan
	400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial
	400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan

400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
	400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
	400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
	400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa
	400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
	400.10.2.5	Pengembangan Kapasitas Desa
400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat	
	400.10.3.1	Lembaga Masyarakat
	400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif
	400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat
	400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan
	400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat
400.10.4	Pemberdayaan Adat dan Sosial	Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

	Budaya Masyarakat	
	400.10.4.1	Budaya Nusantara
	400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan
	400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
	400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial
	400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan
400.10.5	Usaha Ekonomi Masyarakat	
	400.10.5.1	Usaha Pertanian dan Pangan
	400.10.5.2	Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
	400.10.5.3	Produksi dan Pemasaran
	400.10.5.4	Usaha Ekonomi dan Keluarga
	400.10.5.5	Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
400.10.6	Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	
	400.10.6.1	Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
	400.10.6.2	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
	400.10.6.3	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
	400.10.6.4	Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
	400.10.6.5	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
400.10.7	Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	
400.11	PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	
400.11.1	Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.11.2	Pertamanan	
	400.11.2.1	Perencanaan Pertamanan
	400.11.2.2	Taman Kota
	400.11.2.3	Tata Hias dan Ornamen Kota
400.11.3	Pemakaman	
	400.11.3.1	Perencanaan Pemakaman
	400.11.3.2	Pemakaman
	400.11.3.3	Pelayanan Pemakaman
400.11.4	Jalur Hijau	
	400.11.4.1	Perencanaan Jalur Hijau
	400.11.4.2	Jalur Hijau Jalan
	400.11.4.3	Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
400.11.5	Peran Serta Masyarakat	

- 400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
- 400.11.7 Pengelolaan Data
- 400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan

400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- 400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 400.12.2 Pendaftaran Penduduk
 - 400.12.2.1 Identitas Penduduk
 - 400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
 - 400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara
 - 400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
 - 400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.3 Pencatatan Sipil
 - 400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
 - 400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
 - 400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pencatatan Kewarganegaraan
 - 400.12.3.4 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan
 - 400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
 - 400.12.5.2 Kualitas Penduduk
 - 400.12.5.3 Mobilitas Penduduk
 - 400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
 - 400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
- 400.12.6 Penyerasian Kependudukan
 - 400.12.6.1 Indikator Kependudukan
 - 400.12.6.2 Proyeksi Penduduk
 - 400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan
 - 400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
 - 400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan

400.13

KELUARGA BERENCANA

- 400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
 - 400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
 - 400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan
- 400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
 - 400.13.3.1 Penyiapan fasilitas
 - 400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan
- 400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk
 - 400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk
 - 400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
- 400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk
 - 400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter
 - 400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter
- 400.13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
 - 400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi
 - 400.13.6.2 Pemanfaatan parameter
- 400.13.7 Pengembangan Sistem
 - 400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.8 Pengembangan Materi
 - 400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.9 Monitoring dan Evaluasi
 - 400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.10 Analisis Sosial
- 400.13.11 Analisis Ekonomi
- 400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
- 400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
- 400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
- 400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
- 400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
 - 400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga

		berencana pemerintah
	400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
400.13.17		Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
400.13.18		Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
400.13.19		Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
	400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
400.13.20		Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
	400.13.20.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
	400.13.20.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
400.13.21		Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
	400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
400.13.22		Kesertaan keluarga berencana pria
	400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria
	400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
400.13.23		Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
400.13.24		Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
400.13.25		Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
400.13.26		Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak
	400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
	400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
400.13.27		Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
	400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak
	400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
400.13.28		Pelebagaan bina ketahanan remaja
	400.13.28.1	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
	400.13.28.2	Pelebagaan bina ketahanan remaja

		jalur masyarakat
400.13.29	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja	
	400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja
	400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
400.13.30	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	
	400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
	400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
400.13.31	Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	
	400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.32	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan	
	400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
	400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
400.13.33	Pengembangan program usaha ekonomi keluarga	
400.13.34	Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga	
400.13.35	Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga	
	400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
	400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
400.13.36	Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga	
400.13.37	Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera	
400.13.38	Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
	400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39	Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	
	400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
	400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.40	Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi	
	400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

	400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400.13.41	Advokasi dan pencitraan	
400.13.42	Komunikasi, Informasi dan Edukasi	
	400.13.42.1	Promosi
	400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi
	400.13.42.3	Produk media komunikasi
400.13.43	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi	
400.13.44	Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota	
	400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
	400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400.13.45	Hubungan dengan lembaga nonpemerintah	
	400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
	400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
400.13.46	Tenaga Lini Lapangan	
	400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan
	400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
400.13.47	Institusi Masyarakat Pedesaan	
	400.13.47.1	Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
	400.13.47.2	Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
400.13.48	Mekanisme Operasional lini lapangan	
	400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
	400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
400.13.49	Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan	
	400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
	400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
400.13.50	Pengumpulan dan pengolahan data	
400.13.51	Analisis dan evaluasi	
	400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
	400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
400.13.52	Sistem aplikasi dan bank data	
	400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi

	400.13.52.2	Pengelolaan bank data
400.13.53		Infrastruktur teknologi informasi
	400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
	400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
400.13.54		Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
	400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan
	400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi

400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT

400.14.1		Keprotokolan
	400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
	400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan
	400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah
	400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
400.14.2		Daftar nama/alamat kantor /pejabat
400.14.3		Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media
400.14.4		Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
	400.14.4.1	Kliping koran
	400.14.4.2	Brosur/Leaflet/poster/plakat
	400.14.4.3	Pengumuman/pemberitaan
400.14.5		Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
	400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah
	400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
	400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan
	400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)
	400.14.5.5	Forum Kehumasan
	400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa
400.14.6		Dengar pendapat/hearing DPRD
400.14.7		Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
400.14.8		Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal
400.14.9		Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
400.14.10		Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk

- dan iklan
- 400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan
- 400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

500.1 KETAHANAN PANGAN

- 500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
- 500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - 500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
 - 500.1.2.2 Akses Pangan
 - 500.1.2.3 Kerawanan Pangan
- 500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
 - 500.1.3.1 Distribusi Pangan
 - 500.1.3.2 Harga Pangan
 - 500.1.3.3 Cadangan Pangan
- 500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
 - 500.1.4.1 Konsumsi Pangan
 - 500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
 - 500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
- 500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
 - 500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
 - 500.1.5.2 Penghargaan Ketahan Pangan
- 500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
- 500.1.7 Bimbingan Teknis
- 500.1.8 Evaluasi

500.2 PERDAGANGAN

- 500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri
 - 500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
 - 500.2.2.2 Bisa Usaha Jasa Perdangan
 - 500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
 - 500.2.2.4 Informasi Perusahaan
 - 500.2.2.5 Pelaku Pasar
 - 500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
 - 500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
 - 500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal
 - 500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri
 - 500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi

	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi	
	500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik	
	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	
	500.2.2.14	Informasi Pasar	
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri	
	500.2.2.16	Barang Strategis	
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro	
500.2.3		Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar	
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi	
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar	
	500.2.3.4	Tata usaha	
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi	
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen	
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha	
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan	
	500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri	
	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan	
	500.2.3.11	Jasa	
	500.2.3.12	Kerjasama	
	500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama	
	500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian	
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran	
	500.2.3.16	Pengawasan	
	500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	
	500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP	
500.2.4		Perdagangan Berjangka Komoditi	
	500.2.4.1	Pengkajian pasar	
	500.2.4.2	Pengawasan Transaksi	
	500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit	
	500.2.4.4	Pengkajian pasar	
	500.2.4.5	Pengembangan Pasar	
	500.2.4.6	Sistem informasi	
	500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	
	500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang	
	500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang	

- 500.2.5 Bimbingan Teknis
- 500.2.6 Evaluasi

500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

- 500.3.1 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM
 - 500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
 - 500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM
 - 500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi
 - 500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas
- 500.3.3 Produksi
 - 500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - 500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan
 - 500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan
 - 500.3.3.4 Industri Kerajinan dan Pertambangan
 - 500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
- 500.3.4 Pembiayaan
 - 500.3.4.1 Program Pendanaan
 - 500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
 - 500.3.4.3 Urusan Permodalan
 - 500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan
 - 500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
 - 500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
- 500.3.5 Pemasaran dan Jaringan Usaha
 - 500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri
 - 500.3.5.2 Ekspor dan Impor
 - 500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran
 - 500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha
 - 500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis
 - 500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
- 500.3.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan
 - 500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
 - 500.3.6.3 Peran Serta Masyarakat
 - 500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
 - 500.3.6.5 Advokasi
- 500.3.7 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
 - 500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu
 - 500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha

	500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
	500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
	500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK	
	500.3.8.1	Penelitian Koperasi
	500.3.8.2	Penelitian UKM
	500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
	500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK
500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga	
500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)	
	500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan
	500.3.10.2	Sarana dan Prasarana
500.3.11	Monitoring dan Evaluasi	
500.4	KEHUTANAN	
500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.4.2	Penyuluhan	
	500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan
	500.4.2.2	Materi Penyuluhan
	500.4.2.3	Program Penyuluhan
	500.4.2.4	Sarana Penyuluhan
	500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan
	500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan
	500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat
	500.4.2.8	Deseminasi
	500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan
500.4.3	Planologi Kehutanan	
	500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
	500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
	500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
	500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
	500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
	500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
	500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
	500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
	500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan

	500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
	500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
	500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
500.4.4	Bina Usaha Kehutanan	
	500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK
	500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.3	Kerjasama
	500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
	500.4.4.5	Perpanjangan
	500.4.4.6	Modal dan Peralatan
	500.4.4.7	Investasi Industri
	500.4.4.8	Peralatan
	500.4.4.9	Tenaga Kerja
	500.4.4.10	Pemegang Saham
	500.4.4.11	Neraca Perusahaan
	500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
	500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
	500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
	500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
	500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
	500.4.4.17	Produksi Kayu
	500.4.4.18	Produksi non kayu
	500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.21	Industri Non Kayu
	500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
	500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
	500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
	500.4.4.25	Pemblokiran
	500.4.4.26	Denda
	500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
	500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
	500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil

	500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
	500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
	500.4.6.5	Kawasan Konservasi
	500.4.6.6	Pengamanan Hutan
	500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan

		Perlindungan
	500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
	500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
	500.4.6.11	Bina Cinta Alam
	500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
	500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
500.4.7	Bina Pengelolaan	Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
	500.4.7.1	Pengelolaan Benih
	500.4.7.2	Kebun Benih
	500.4.7.3	Tegakan Benih
	500.4.7.4	Pengadaan Benih
	500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
	500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.7	Pembibitan
	500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
	500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
	500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
	500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	500.4.7.14	Perhutanan Sosial
	500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
	500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
	500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
	500.4.8.3	Diseminasi
	500.4.8.4	Gelar Teknologi
	500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN

500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.5.2	Perikanan Tangkap	
	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan

	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
	500.5.2.14	Kenelayanan
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.3	Perikanan Budidaya	
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
	500.5.4.2	Pengembangan Produk
	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	500.5.4.4	Industri Pengolahan
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi

	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
	500.5.4.8	Pengembangan Industri
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
	500.5.4.18	Pengembangan Impor
	500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.20	Pelayanan Usaha
	500.5.4.21	Kemitraan Usaha
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
	500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil

	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.17	Akses Permodalan
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
	500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
	500.5.6.17	Penyidikan
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
500.5.7	Karantina Ikan	
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
	500.5.7.2	Penahanan
	500.5.7.3	Pengasingan
	500.5.7.4	Pengamatan
	500.5.7.5	Pengakuan
	500.5.7.6	Penolakan

	500.5.7.7	Pemusnahan
	500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
	500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
	500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
	500.5.7.14	Surat Perintah
	500.5.7.15	Rekomendasi
	500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
	500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
	500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
	500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
	500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
	500.5.7.21	Lokasi Karantina
500.6	PERTANIAN	
	500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.6.2	Perlindungan hortikultura
	500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
	500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
	500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
	500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
	500.6.3	Perbenihan Hortikultura
	500.6.3.1	Penilaian Varietas
	500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
	500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
	500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan
	500.6.4.1	Basis Data Lahan
	500.6.4.2	Pengendalian Lahan
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
	500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
	500.6.5.4	Kelembagaan
	500.6.6	Pembiayaan Pertanian
	500.6.6.1	Pembiayaan Program

	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
500.6.7	Pupuk Pestisida	
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik
	500.6.7.3	Pestisida
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
500.6.10	Budidaya Serealia	
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia Lain
500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi Kayu
	500.6.11.3	Aneka Kacang
	500.6.11.4	Aneka Umbi
500.6.12	Tanaman Pangan	
	500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
	500.6.12.3	Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu
500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan	
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia lain
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
	500.6.13.4	Aneka Umbi

500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian
500.6.14.1	Tanaman Pangan
500.6.14.2	Hortikultura
500.6.14.3	Perkebunan
500.6.14.4	Peternakan
500.6.15	Mutu dan Standarisasi
500.6.15.1	Standardisasi
500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi
500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
500.6.16.2	Investasi
500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
500.6.17	Pemasaran Domestik
500.6.17.1	Informasi Pasar
500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat)
500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
500.6.20	Diseminasi
500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demplot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya
500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan
500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
500.6.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
500.6.26.1	Hak Cipta
500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
500.6.26.3	Hak Paten Biasa
500.6.26.4	Hak Merek

	500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
	500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
	500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak
500.6.27	Pelayanan Perijinan Pertanian	
	500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
	500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
	500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
500.6.28	Pelayanan Hukum	
	500.6.28.1	Sertifikasi
	500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
500.6.29	Karantina Pertanian	
	500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
	500.6.29.2	Karantina Hewan
500.6.30	Bimbingan Teknis	
500.6.31	Evaluasi	

500.7 **PETERNAKAN**

500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	500.7.2.1	Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)
	500.7.2.2	Pakan Ternak
	500.7.2.3	Budidaya Ternak
	500.7.2.4	Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan)
	500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan,

500.7.3	Bimbingn
	Teknis
500.7.4	Evaluasi
500.8	PERKEBUNAN
500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.8.2	Tanaman Semusim
	500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
	500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim
	500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
	500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim
500.8.3	Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar
	500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar
500.8.4	Tanaman Tahunan
	500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
	500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan
	500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan
	500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
500.8.5	Perlindungan Perkebunan
	500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
	500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
	500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha
500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan
500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan
500.8.8	Evaluasi Perkebunan

500.9 PERINDUSTRIAN

500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama
500.9.2.1	Industri Manufaktur
500.9.2.2	Industri Agro
500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.3	Promosi Industri
500.9.3.1	Industri Manufaktur
500.9.3.2	Promosi Industri Agro
500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.4	Standarisasi dan Teknologi
500.9.4.1	Industri Manufaktur
500.9.4.2	Industri Agro
500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual
500.9.5.1	Industri Manufaktur
500.9.5.2	Industri Agro
500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.6	Industri Hijau
500.9.6.1	Industri Manufaktur
500.9.6.2	Industri Agro
500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
500.9.12	Standarisasi
500.9.12.1	Standar
500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
500.9.12.3	Infrastruktur Standar
500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
500.9.13.1	Kebijakan Industri
500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif
500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial
500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
500.9.14.1	Industri Hijau
500.9.14.2	Lingkungan Hidup
500.9.14.3	Energi
500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri

500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.10.2	Rekomendasi Kegeologian
500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.2.3	Pertambangan
500.10.2.4	Panas Bumi
500.10.2.5	Geosains
500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan
500.10.3	Penelitian Kegeologian
500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian
500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian
500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian
500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian

	500.10.3.6	Sumber Daya Geologi
	500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	500.10.3.9	Survei Geologi
500.10.4		Inventarisasi dan evaluasi kegeologian
	500.10.4.1	Sumber Daya Geologi
	500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.4.4	Survei Geologi
	500.10.4.5	Konservasi
500.10.5		Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
	500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran
	500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
	500.10.5.4	Survei Geologi
500.10.6		Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
	500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
	500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
	500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
	500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
	500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.7		Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
	500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
	500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan

		Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
	500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
	500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
	500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
	500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
	500.10.7.7	Partisipasi Interest
	500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain (antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan)
	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
	500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) (antara lain: Berkas permohonan,

		Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT)
	500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
	500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
	500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)
	500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)
	500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
	500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir (antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi)
	500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja (antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi)
	500.10.9.10	Usaha penunjang
500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan

		Gas Bumi
500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
	500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
500.10.12	Panas Bumi	
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specification (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
	500.10.12.8	Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
	500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
	500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi	
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan

		Bakar Nabati (BNN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.14	Aneka Energi	
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.15	Konservasi Energi	
	500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
	500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
	500.10.15.9	Investment Grade Audit (IGA)
	500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan

		Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan
		Infrastruktur Bidang EBTKE
	500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik	
	500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik)
	500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik pedesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu)
	500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan
500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistrikan	
	500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin)
	500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
	500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik
	500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik (antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero))
500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
	500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
	500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
	500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan

		Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)
500.10.20	Sertifikasi	
	500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
	500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
	500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
	500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
	500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan	
500.10.22	Standarisasi Kompetensi	
500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara	
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara

	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
	500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
	500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
	500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
	500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
	500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral	
	500.10.26.1	Ketenagakerjaan
	500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
	500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
	500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
	500.10.26.12	Teguran kepada pengusahaan Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
	500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP)

	Mineral
500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara
500.10.27.1	Ketenagakerjaan
500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut) antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara
500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
500.10.27.12	Teguran kepada pengusaha Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
500.10.28	Penerimaan Negara
500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak

	500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
	500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	
	500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)
	500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
	500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
	500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja (antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang (antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi)
	500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
	500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
	500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia
	500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang)
	500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi (antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi)
	500.10.29.11	Pemberian Penghargaan (antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda

		Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan)
	500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan
	500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
	500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
	500.10.29.15	Rekomendasi Teknis (antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis)
	500.10.29.16	Persetujuan Teknis (antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis)
	500.10.29.17	Pengawasan Teknis
	500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
	500.10.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan)
500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan	
	500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
	500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi
	500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayaguna an/replikasi/prototipe hasil penelitian/ pengkajian/pengembangan/inovasi
	500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
	500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian,pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan,pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu

		pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
	500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
	500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
500.10.31	Sarana Litbang	
	500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
	500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
500.10.32	Afiliasi	
	500.10.32.1	Proyek Percontohan
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
	500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
	500.10.32.4	Penyajian Informasi
500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	
	500.10.33.1	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
	500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
	500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
	500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
	500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
	500.10.34.3	Laboratorium
	500.10.34.4	Study
	500.10.34.5	Teknologi Proses
	500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
	500.10.34.7	Teknologi Gas
500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara	
	500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
	500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
	500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara

- 500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
 - 500.10.36.1 Energi baru terbarukan
 - 500.10.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan
 - 500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi
 - 500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

500.11 PERHUBUNGAN

- 500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan
 - 500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
 - 500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
 - 500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama
 - 500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
 - 500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
 - 500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
 - 500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer
 - 500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal
 - 500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder
- 500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan
 - 500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
 - 500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan
- 500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
 - 500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
 - 500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
 - 500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
- 500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor
 - 500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
 - 500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
 - 500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
 - 500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi

		kendaraan bermotor
500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
	500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
	500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
500.11.7	Perlengkapan Jalan	
	500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
	500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
	500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
500.11.8	Angkutan Penumpang	
	500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
	500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
	500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
	500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
	500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
	500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
	500.11.8.7	Angkutan perintis
	500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum
500.11.9	Angkutan Barang	
	500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.9.2	Tarif angkutan barang
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
500.11.10	Monitoring Operasional	
	500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi

kewenangan

500.11.11	500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
	Bimbingan Teknis	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	500.11.11.1	Pedoman Teknis
	500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.11.11.3	Bimtek PPNS
500.11.12	500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	Analisa dan Evaluasi Jaringan	Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
500.11.13	Pengembangan Jaringan	Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
	500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.14	Rancang Bangun	Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
500.11.15	Bimbingan Perawatan	Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.15.2	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan
500.11.16	Rancang Bangun	Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
	500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional

	500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	
500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.18.1	Manajemen lalu lintas
	500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
	500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
	500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
	500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.20.1	Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.20.2	Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
500.11.21	Tarif dan Keperintisan	
	500.11.21.1	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.21.2	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan	
	500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan
	500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
	500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan	
	500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
	500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas

		perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
500.11.24	Angkutan Perkotaan	
	500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
	500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan
	500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan	
	500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
	500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan	
	500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
	500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
	500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
	500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
	500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan
500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	
	500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
	500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian
	500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan

penyeberangan

500.11.28	Pengembangan Keselamatan
500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan
500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan
500.11.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum
500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
500.11.31	Audit Keselamatan
500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
500.11.32	Inspeksi Keselamatan
500.11.32.1	Pedoman keselamatan
500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
500.11.33	Parkir
500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah

500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.12.2	Telekomunikasi

	500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
	500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
	500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
	500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
500.12.3	Penyiaran	
	500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
	500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal	
	500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
	500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
	500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
	500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
	500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
500.12.5	Pengendalian Informatika	
	500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
	500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
	500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
	500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
500.12.6	e- Government	
	500.12.6.1	Tata Kelola e-Government
	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
500.12.7	e- Business	
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan

		Aplikasi Informatika
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10		Keamanan Informasi
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11		Komunikasi Publik
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12		Pengolahan dan Penyediaan Informasi
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian
	500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13		Pengelolaan Media Publik
	500.12.13.1	Media Cetak
	500.12.13.2	Media Online
	500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
500.12.14		Kemitraan Komunikasi
	500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
	500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
	500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
500.12.15		Infrastruktur Informatika
	500.12.15.1	Jaringan
	500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika
	500.12.15.3	Keamanan Informatika
500.12.16		Sistem dan Data
	500.12.16.1	Portal dan Konten
	500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data
	500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi
500.12.17		Pusat Kerjasama
	500.12.17.1	Kerja Sama daerah
	500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral
500.12.18		Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
	500.12.18.1	Pelayanan Informasi
	500.12.18.2	Hubungan Masyarakat
	500.12.18.3	Bimbingan Teknis

500.12.19	Evaluasi
500.13	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata
500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata
500.13.2.3	Industri Pariwisata
500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
500.13.3	Pemasaran Pariwisata
500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman
500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK
500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitas
500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.14	STATISTIK
500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
500.14.2.1	Perencanaan

	500.14.2.2	Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
	500.14.2.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
500.14.3	Survei	
	500.14.3.1	Perencanaan
	500.14.3.2	Persiapan
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas)
	500.14.3.4	Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)

	500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi)
	500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei
500.14.4	Konsolidasi Data Statistik	
	500.14.4.1	Kompilasi Data
	500.14.4.2	Analisis data
	500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	
500.15	KETENAGAKERJAAN	
500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja	
	500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	
	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
	500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan

		Tenaga Pelatihan
500.15.6	Bina Pemagangan	
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan	
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
	500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja	
	500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
	500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
	500.15.8.3	Bursa Kerja
	500.15.8.4	Analisis Jabatan
500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
	500.15.9.1	Antar Kerja
	500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
	500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	
	500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
	500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
	500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
	500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.11	Standardisasi Profesi	
	500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
	500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	
	500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
	500.15.12.2	Perjanjian Kerja
	500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
	500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial	
	500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha

	500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
	500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
	500.15.14.1	Pengupahan
	500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	
	500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
	500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
	500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	
	500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
	500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
	500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektor
	500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
	500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
	500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
	500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
	500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	
500.15.20	Bina Penegakan Hukum	
	500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum
500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan	

		dan Kesehatan Kerja (K3)
	500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3
	500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
	500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
	500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	
	500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
	500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.16	PENANAMAN MODAL	
	500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal
	500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
	500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur
	500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan
	500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur
500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal
	500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah
	500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha
	500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
	500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
	500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
500.16.4	Promosi Penanaman Modal	
	500.16.4.1	Pengembangan Promosi

	500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi
	500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri
	500.16.4.4	Promosi Sektoral
	500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah
	500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi
500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal	
	500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
	500.16.5.2	Kerja Sama Regional
	500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal
	500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal
	500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
	500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah
	500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal
	500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal	
	500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi
	500.16.7.2	Pelayanan Perijinan
	500.16.7.3	Pelayanan Konsultasi Perijinan
	500.16.7.4	Pelayanan Non Perijinan
	500.16.7.5	Pelayanan Fasilitas
500.17	PERTANAHAN	
	500.17.1	Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.17.2	Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
	500.17.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
	500.17.2.2	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
	500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan
	500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian
500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah	
	500.17.3.1	Penatagunaan Tanah
	500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik
	500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah
500.17.4	Sengketa Tanah	
	500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa
	500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian
500.18	TRANSMIGRASI	
	500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi	
	500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
	500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah
	500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan
	500.18.2.4	Advokasi Pertanahan
500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	
	500.18.3.1	Penyiapan Lahan
	500.18.3.2	Penyiapan Sarana
	500.18.3.3	Penyiapan Prasarana
	500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman
500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	
	500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi
	500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan
	500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan
	500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi
500.18.5	Partisipasi Masyarakat	
	500.18.5.1	Promosi dan Motivasi
	500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan
	500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah
	500.18.5.4	Pelayanan Investasi
500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	
	500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
	500.18.6.2	Bina Sistem Informasi
	500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan
	500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat
	500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat	
	500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan
	500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya
	500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan
	500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
500.18.8	Pengembangan Usaha	
	500.18.8.1	Kewirausahaan
	500.18.8.2	Produksi
	500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
	500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan
500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan	
	500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan

		Prasarana
	500.18.9.2	Pengembangan Sarana
	500.18.9.3	Pengembangan Prasarana
	500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
500.18.10	Penyerasian Lingkungan	
	500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
	500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
	500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
	500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN	
600.1	PEKERJAAN UMUM	
	600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air
	600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai
	600.1.2.2	Kelembagaan
	600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air
	600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
	600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan
600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air	
	600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
	600.1.3.2	Manajemen Mutu
	600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air
	600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman
600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air	
	600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai
	600.1.4.2	Pengelolaan Irigasi dan Rawa
	600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
	600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	
	600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
	600.1.5.2	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
	600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
	600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku

	600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6	Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)	
	600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan	
	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
600.1.8	Pembangunan Jalan	
	600.1.8.1	Standar dan Pedoman
	600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
	600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
600.1.9	Preservasi Jalan	
	600.1.9.1	Standar dan Pedoman
	600.1.9.2	Perencanaan Teknis
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
600.1.10	Pengelolaan Jembatan	
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis
	600.1.10.3	Teknik Jembatan
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
600.1.12	Pengaturan Jalan Tol	

	600.1.12.1	Persiapan pengusaha jalan tol
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusaha jalan tol
600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman	
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
	600.1.14.5	Kelembagaan
600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan	
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
	600.1.15.5	Kelembagaan
600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	600.1.16.1	Perencanaan Teknis
	600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
	600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
	600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
	600.1.16.5	Kelembagaan
	600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
	600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.17	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	
	600.1.17.1	Perencanaan Teknis
	600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
	600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
	600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
	600.1.17.5	Kelembagaan
	600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.18	Pemantauan dan Evaluasi	

600.2

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

600.2.1	Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
600.2.2	Perencanaan Pembiayaan Perumahan
	600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan
	600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
	600.2.2.3 Kemitraan
600.2.3	Pola Pembiayaan Perumahan
	600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
	600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
	600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan
600.2.4	Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
	600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer
	600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder
	600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
	600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan
	600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
600.2.5	Perencanaan Penyediaan Perumahan
	600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan
	600.2.5.2 Analisa Teknik
	600.2.5.3 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
	600.2.5.4 Kemitraan dan Kelembagaan
600.2.6	Penyediaan Rumah Susun
	600.2.6.1 Perencanaan Teknik
	600.2.6.2 Penyediaan
	600.2.6.3 Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
	600.2.6.4 Pengelolaan
600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus
	600.2.7.1 Perencanaan Teknik
	600.2.7.2 Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
	600.2.7.3 Bimbingan teknis dan supervisi
	600.2.7.4 Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
	600.2.7.5 Perencanaan Teknik
	600.2.7.6 Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
	600.2.7.7 Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
	600.2.8.1 Perencanaan Teknik
	600.2.8.2 Pemberian Bantuan Rumah Umum

	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9		Investasi Infrastruktur
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10		Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu
600.2.11		Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
	600.2.11.1	Kelembagaan
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12		Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
600.2.13		Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
	600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
	600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.14		Peningkatan Jasa Konstruksi
	600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
	600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
600.2.15		Penerapan Teknologi Konstruksi
	600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
	600.2.15.2	Pengembangan Materi
	600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.16		Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
	600.2.16.1	Antar Sektor
	600.2.16.2	Antar Wilayah
600.2.17		Pengembangan Kawasan Strategis
	600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis

	600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
600.2.18		Pengembangan Kawasan Perkotaan
	600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
	600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
	600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
	600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
	600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.19		Pemantauan dan Evaluasi
600.3	TATA RUANG (TATA KOTA)	
600.3.1		Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah
600.3.2		Perencanaan
	600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
	600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
	600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
	600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
	600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
	600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
	600.3.2.7	Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota
600.3.3		Pemanfaatan dan Pengendalian
	600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
	600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang
	600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
600.3.4		Pemetaan
	600.3.4.1	Peta Dasar
	600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat
	600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air
	600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara
600.4	LINGKUNGAN HIDUP	
600.4.1		Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
600.4.2		Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan

	Lingkungan Hidup
600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor
600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
600.4.4	Ekonomi Lingkungan
600.4.5	Dampak Lingkungan
600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan
600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan
600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa
600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan
600.4.8.1	Pengembangan
600.4.8.2	Pemanfaatan
600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
600.4.8.4	Keamanan Hayati
600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
600.4.9.2	Rawa
600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
600.4.10.1	Perangkat mitigasi
600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim
600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan

Iklim)

600.4.12	600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	
	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
600.4.13	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun	
	600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
	600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
	600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
600.4.14	600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	
	600.4.14.1	Pemantauan
	600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
600.4.15	Pengelolaan Sampah	
	600.4.15.1	Pembatasan sampah
	600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
	600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
	600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura
600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan	
	600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
	600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	
	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
	600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan	
	600.4.18.1	Penyidikan
	600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
600.4.19	Komunikasi Lingkungan	
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat	
	600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
	600.4.20.2	Kearifan Lingkungan

600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat
600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan
600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan
600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat
600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan
600.4.23.1	Pengelolaan Data
600.4.23.2	Pengelolaan Informasi
600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
600.4.24	Kelembagaan Lingkungan
600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
600.4.25	Standarisasi dan teknologi
600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan
600.4.26	Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lngkungan
600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian

700 PENGAWASAN

700.1 PENGAWASAN INTERNAL

700.1.1	Rencana Pengawasan
700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan
700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan
700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan
700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut

700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)

800 KEPEGAWAIAN

800.1 SUMBER DAYA MANUSIA

800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan)
800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas)
800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.4	Standarisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan)
800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai
800.1.2.1	Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus)
800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN)
800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
800.1.2.5	Pengangkatan ASN
800.1.2.6	Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)
800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN

	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
800.1.3	Mutasi Pegawai	
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
800.1.4	Pengembangan Karir	
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
	800.1.4.5	Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit)
800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara	
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
	800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara

dan Jada/Dudanya)

800.1.7	Bantuan Hukum
800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai
800.1.8.1	Status Kepegawaian
800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
800.1.8.3	Keberatan Pegawai
800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian
800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian
800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11	Administrasi Pegawai
800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
800.1.11.2	Cuti Sakit
800.1.11.3	Cuti Bersalin
800.1.11.4	Cuti Tahunan
800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
800.1.11.6	Cuti Besar
800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan
800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala,

		Mutasi Gaji/ tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	
800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	
800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS	
800.1.12.3	Tabungan Perumahan	
800.1.12.4	Bantuan Sosial	
800.1.12.5	Pakaian Dinas	
800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas	
800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih	
800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	
800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi	
800.1.12.10	Rekam Medis	
800.1.13	Administrasi Perseorangan	
800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	
800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan	
800.1.13.4	Sekretaris Daerah	
800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	
800.1.14	Penilaian Kompetensi	
800.1.14.1	Penilaian Kompetensi	
800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi	

800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah	
800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan	
800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat	
800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan	
800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat	
800.2.2.4	Modul-modul diklat	
800.2.2.5	Panduan fasilitator	
800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	
800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	
800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat	
800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat	
800.2.3	Widyaiswara	
800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara	

	800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
	800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
	800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
	800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
	800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
800.2.4	Penyelenggaraan Diklat	
	800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
	800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
	800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
	800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
	800.2.4.5	Sistem informasi diklat
	800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
	800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
800.2.5	Alumni	

900 KEUANGAN

900.1

KEUANGAN DAERAH

900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)	
	900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
	900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
	900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
	900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
900.1.2	Penyusunan Anggaran	
	900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
	900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
	900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
	900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	

	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
	900.1.3.2	Pendapatan
	900.1.3.3	Belanja
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
	900.1.3.7	Daftar Gaji
	900.1.3.8	Kartu Gaji
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
	900.1.3.10	Laporan Keuangan
900.1.4		Pinjaman/Hibah Luar Negeri
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
	900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
	900.1.4.4	Dokumen Loan Agreemeent (PHLN) (antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender)
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncuran dana)
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.)
	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)
	900.1.4.10	Staff Appraisal Report
	900.1.4.11	Report /Laporan
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
	900.1.4.13	<i>Completion Report/Annual Report</i>
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri

900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)
900.1.7.3	Buku Rekening Bank
900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran)
900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan
900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)
900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
900.1.12	Anggaran Daerah
900.1.12.1	Anggaran Daerah
900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah

- 900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah
- 900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitas pelaksanaan kebijakan standarisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitas pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah)
- 900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah)

Ditetapkan di Singkawang

pada tanggal 16 Desember 2022

WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

TJHAI CHUI MIE

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H

NIP. 19740716 200502 1 001